



**RENCANA KERJA**  
**BKPSDM**  
**2024**



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta Indikator Kinerja berikut Kelompok Sasarannya. Dengan adanya Renja ini diharapkan dapat menyusun APBD yang objektif, hal ini dikarenakan rencana program dan kegiatan didalamnya sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Menyadari Pentingnya Rencana Kerja (RENJA) ini sebagai Dasar pelaksanaan kegiatan, maka penyusunannya senantiasa melibatkan unit-unit pelaksanaan seperti : Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Subkoordinator di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak guna mendapat masukan-masukan demi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini sebagai acuan pelaksanaan tugas bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
1.1	Latar Belakang .....	I-1
1.2	Landasan Hukum.....	I-4
1.3	Maksud dan Tujuan .....	I-7
1.4	Sistematika Penulisan .....	I-8
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN LALU</b>	<b>II-1</b>
2.1	Evaluasi Pelaksanaan RENJA BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM .....	II-1
2.1.1	Realisasi Program/Kegiatan Yang tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan .....	II-1
2.1.2	Relisasi Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang direncanakan .....	II-2
2.1.3	Realisasi Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan .....	II-2
2.1.4	Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya /Melebihi Target Kinerja Program/ Kegiatan .....	II-4
2.1.5	Implementasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra BKPSDM .....	II-5
2.1.6	Kebijakan / Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan .....	II-5
2.2	Analisis Kinerja BKPSDM .....	II-15
2.3	Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat .. Daerah .....	II-35
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-37
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-42
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	III-1

3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	III-2
3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	III-4
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V	PENUTUP .....	V-1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tersebut, kemudian Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan yang isinya memuat target dan sasaran serta anggaran yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran kedepan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan

dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi perangkat daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak merupakan salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.01 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 124 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak. Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak, Kepala Badan bertugas merumuskan kebijakan teknis dan bertanggung jawab kepada Walikota Pontianak melalui Sekretaris Daerah Kota Pontianak, dan di dukung oleh dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak. Dengan adanya kebijakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka perlu upaya optimalisasi sumber daya yang dimiliki daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan

nasional dan provinsi, maka Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024 dalam melaksanakan perencanaan pembangunan harus merupakan kesatuan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan atau *outcome* yang ingin diwujudkan pada tahun 2024. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026. Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan dibidang kepegawaian. Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansial, kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak tahun 2024 tidak boleh lepas dari beberapa hal diantaranya:

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Artinya, apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kepegawaian dapat lebih optimal.
2. Memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang kepegawaian pada tahun sebelumnya. Pernyataan di atas dapat diartikan, bahwa pembangunan yang masih belum mampu diselesaikan atau bahkan yang belum terlaksana pada tahun 2023 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2024 ini.
3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun satu tahun berikutnya sekaligus mengantisipasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dikembangkan dengan baik

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
22. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).

24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renja PD dengan renstra PD serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Kepegawaian dan Pe urusan Pendidikan Pelatihan berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

### 1.1. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Perencanaan strategis yang telah ditetapkan, perlu diukur sejauh mana pencapaian kinerja program dan kegiatan dari tahun awal penetapan hingga tahun terakhir pelaksanaan. Untuk mengetahui pelaksanaan rencana kerja (renja) tahun yang lalu, maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak tahun lalu. Selanjutnya dijelaskan capaian program/kegiatan sebagai berikut.

##### **2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 terdapat beberapa kegiatan dengan pencapaian realisasi kinerja dibawah target yang telah ditetapkan antara lain:

###### **1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK**

Untuk tahun 2022, alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 689.641.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 95.640.151,00 atau sebesar 14.01%. Pada tahun 2022 formasi PPPK hanya untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Pelaksanaan seleksi PPPK dilakukan oleh Pemerintah Pusat yaitu melalui Kementerian Pendidikan untuk PPPK tenaga pendidikan, dan oleh Kementerian Kesehatan untuk tenaga kesehatan. Pemerintah Kota Pontianak hanya melakukan fasilitasi

kegiatan seleksi tersebut, sehingga anggaran seleksi PPPK yang telah dianggarkan terutama untuk biasa sewa komputer CAT, Panitia kegiatan dan lainnya tidak dapat direalisasikan.

## 2. Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN

Untuk tahun 2022, alokasi anggaran pada subkegiatan ini adalah sebesar Rp 164.678.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.300.000,00 atau sebesar 2 %. Sedangkan target kinerja untuk subkegiatan ini adalah 30 ASN yang mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional tertentu, dengan realisasi atas target kinerja sebanyak 12 ASN atau sebesar 33.33 %. Tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan disebabkan karena Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan uji kompetensi bagi tenaga fungsional Pol PP, sampai dengan akhir tahun 2022 tidak melaksanakan uji kompetensi bagi JFT Pol PP.

### **2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Jumlah kegiatan pada BKPSDM Kota Pontianak Tahun 2022 yang memenuhi target kinerja sebesar 100 % terdapat sebanyak 32 (tiga puluh dua) kegiatan atau sebesar 64.71% dari total keseluruhan kegiatan sebanyak 51 subkegiatan.

### **2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM Kota Pontianak tahun anggaran 2022 terdapat beberapa subkegiatan yang memiliki capaian melebihi target yang telah ditetapkan yaitu:

#### 1. Pengelolaan Informasi Kepegawaian

Untuk tahun 2022, alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 55.452.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.898.168,- atau sebesar 48,5%. Target kinerja pada subkegiatan ini adalah 5000 ASN dengan capaian kinerja sebesar 5.877 ASN atau sebesar 118 %. Pada subkegiatan ini terjadi efisiensi anggaran namun capaian kinerja melebihi target. Tingginya capaian kinerja untuk subkegiatan ini disebabkan banyaknya perubahan data PNS

yang harus dimasukkan dalam data aplikasi SIMPEG. Perubahan tersebut meliputi perubahan pangkat/Golongan, Tanggungan, Pendidikan, Gelar, pelatihan/bimtek yang diikuti dan data lainnya.

## 2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Untuk tahun 2022, alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 100.726.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 79.471.325,- atau sebesar 79%. Target kinerja pada subkegiatan ini adalah 500 SK dengan capaian kinerja sebesar 593 SK atau sebesar 119%. Pada subkegiatan ini terjadi efisiensi anggaran namun capaian kinerja melebihi target. Tingginya capaian kinerja untuk subkegiatan ini disebabkan banyaknya PNS jabatan fungsional yang telah memenuhi angka kredit untuk kenaikan jenjang sehingga dapat diberikan kenaikan pangkat.

## 3. Pengelolaan Promosi ASN

Untuk tahun 2022, alokasi anggaran untuk subkegiatan ini sebesar Rp. 397.410.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 382.820.081,- atau sebesar 96%. Target kinerja pada subkegiatan ini adalah 102 ASN dengan capaian kinerja sebesar 106 ASN atau sebesar 104%. Tingginya capaian kinerja untuk subkegiatan ini disebabkan adanya pembentukan OPD baru yaitu Dinas tenaga Kerja dan perubahan status Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik sehingga menambah jabatan eselon 2, 3 dan eselon 4 pada OPD tersebut.

## 4. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

Untuk tahun 2022, alokasi anggaran untuk subkegiatan ini sebesar Rp. 1.004.466.195,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 919.100.010,- atau sebesar 92%. Target kinerja pada subkegiatan ini adalah 200 ASN dengan capaian kinerja sebesar 411 ASN atau sebesar 206%. Tingginya capaian kinerja untuk subkegiatan ini disebabkan banyaknya kegiatan Bimtek/workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan di Kota Pontianak dengan biaya kontribusi yang lebih murah sehingga anggaran yang ada dapat dioptimalkan untuk menambah jumlah peserta bimtek.

## 5. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

Untuk tahun 2022, alokasi anggaran untuk subkegiatan ini sebesar Rp. 242.797.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 198.540.730,- atau sebesar 82%. Target kinerja pada subkegiatan ini adalah 110 ASN dengan

capaian kinerja sebesar 431 ASN atau sebesar 392%. Tingginya capaian kinerja untuk subkegiatan ini karena pada tahun 2022 sebagian besar jabatan struktural pengawas beralih menjadi Jabatan Fungsional tertentu sehingga perlu dilakukan pembimbingan dalam penyusunan angka kredit.

6. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional.

Untuk tahun 2022, alokasi anggaran untuk subkegiatan ini sebesar Rp. 4.250.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.250.000,- atau sebesar 100%. Target kinerja pada subkegiatan ini adalah 30 SK dengan capaian kinerja sebesar 139 SK atau sebesar 463%. Tingginya capaian kinerja untuk subkegiatan ini karena adanya rotasi kepala sekolah SD dan SMP di Kota Pontianak.

7. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai.

Untuk tahun 2022, alokasi anggaran untuk subkegiatan ini sebesar Rp. 17.550.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 550.000,- atau sebesar 3%. Target kinerja pada subkegiatan ini adalah 100 ASN dengan capaian kinerja sebesar 156 ASN atau sebesar 156%. Tingginya capaian kinerja untuk subkegiatan ini disebabkan adanya banyak pengajuan untuk Satya Lencana Karya Satya bagi pegawai yang disetujui oleh Pemerintah Pusat.

8. Pembinaan Disiplin

Untuk tahun 2022, alokasi anggaran untuk kegiatan pembinaan disiplin sebesar Rp. 255.997.944,- dengan realisasi anggaran untuk subkegiatan pemeriksaan kesehatan sebesar Rp. 212.863.768,- atau sebesar 83%. Target kinerja pada subkegiatan ini adalah 253 ASN dengan capaian kinerja sebesar 392 ASN atau sebesar 155%. Tingginya capaian kinerja untuk subkegiatan ini disebabkan banyaknya PNS yang diikutsertakan dalam pengambilan sumpah bagi PNS.

#### **2.1.4. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan**

Berdasarkan evaluasi, secara umum yang menjadi faktor tidak tercapainya target kinerja diantaranya :

1. Kebijakan seleksi PPPK ditentukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kota Pontianak hanya memfasilitasi kegiatan tersebut.



2. Perubahan kebijakan dari pemerintah pusat menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Sedangkan faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja diantaranya :

1. Antusiasme ASN Pemerintah Kota Pontianak untuk meningkatkan kompetensi individu dengan mengikuti pelatihan /bimtek/workshop dan sejenisnya.
2. Dukungan dari seluruh jajaran BKPSDM mulai dari pimpinan hingga pelaksana dalam mencapai target kinerja.

#### **2.1.5. Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra BKPSDM**

Dilihat dari capaian tersebut di atas, secara umum BKPSDM dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut tentunya akan mendorong tercapainya sasaran strategis BKPSDM yaitu mewujudkan sistem merit dalam manajemen ASN di Kota Pontianak. Diharapkan pada tahun 2023 capaian indek system merit Pemerintah Kota Pontianak meningkat menjadi Sangat Baik.

#### **2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan**

Dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan BKPSDM Kota Pontianak tahun 2023, BPKSDM Kota Pontianak telah menyusun strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Menyusun target kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta mengantisipasi segala hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam mencapai sasaran.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang dapat mendukung pencapaian sasaran.
3. Mempercepat pelaksanaan yang mungkin dapat dilaksanakan pada semester pertama untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran.

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak tahun 2022 perkiraan capaian realisasi target Renstra diuraikan dalam tabel 2.1.1 berikut ini :

Tabel 2.1.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023  
Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kinerja s/ d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan						
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun n-1) - Sampai dengan TW I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)				
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	03	KEPEGAWAIAN															
5	03	02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>80%</b>	<b>101.38</b>	<b>126.73</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>38.09</b>	<b>%</b>	<b>47.61%</b>			
5	03	02	2	01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Persentase Administrasi Pelaksanaan Pengadaan, dan Pemberhentian ASN serta sistem informasi yang terintegrasi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>98.9</b>	<b>98.90</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>64.99</b>	<b>%</b>	<b>16.25%</b>	
5	03	02	2	01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	4	Dok	2	2	100.00	2	Dok	1	Dok	25.00%
5	03	02	2	01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seleksi ASN Sesuai Ketentuan	4	Keg	1	1	100.00	1	Keg	-	Keg	0.00%
							Jumlah Surat Keputusan Pengangkatan CASN Yang Diterbitkan	1600	SK	436	0	0.00	436	SK	-	SK	0.00%
							Jumlah SK Pengangkatan sebagai PNS sesuai formasi	1741	SK	388	387	99.74	388	SK	387	SK	22.23%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kinerja s/ d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan							
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun n-1) - Sampai dengan TW I		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
											10=(5+7+9)	11=(10/4)						
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)						
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK							2	Dok	-	Dok	0.00%					
5	03	02	2	01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pemberhentian (Pensiun) dan Pangkat Pengabdian Pegawai Yang diterbitkan	1145	SK		298	300	100.67	298	SK	126	SK	11.00%
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi pemberhentian												4	Dok	3	Dok	75.00%
5	03	02	2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang Dikelola dan Digitalisasi	20000	ASN		5000	5877	117.54	5000	ASN	3,469	ASN	17.35%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian												12	Dok	3	Dok	
5	03	02	2	01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Berkala dan Tata Kelola Arsip ASN	64	Dok		16	16	100.00	16	Dok	8	Dok	12.50%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian												16	Dok	4	Dok	
5	03	02	2	02		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase Pelayanan Kepegawaian yang sesuai SOP</b>	<b>80</b>	<b>%</b>		<b>80</b>	<b>114.22</b>	<b>142.78</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>37.61</b>	<b>%</b>	<b>47.01%</b>
5	03	02	2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen/berkas PNS Yang akan pindah ke Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	200	Dok		50	45	90.00	50	Dok	25	Dok	12.50%
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan												4	Dok	3.00	Dok	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kinerja s/ d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan														
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun n-1) - Sampai dengan TW I		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)												
											10=(5+7+9)	11=(10/4)													
1						2		3		4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
5	03	02	2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat Yang diselesaikan Tepat Waktu	2000	SK		500	593	118.60	500	SK	167	SK			8.35%					
							Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Layanan Administrasi Kepegawaian dan Akurasi Data ASN Yang Akan Naik Pangkat	8	Dok		2	2	100.00	2	Dok	-	Dok			0.00%					
5	03	02	2	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN Pejabat Administrasi tertentu yang ditempatkan sesuai dengan hasil Penilaian Tim Penilai	400	ASN		100	99	99.00	100	ASN	53	ASN			13.25%					
							Jumlah ASN Yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka	8	ASN		2	8	400.00	2	ASN	1	ASN			12.50%					
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN							2	Dok	1	Dok								
5	03	02	2	03		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>186.36</b>	<b>186.36</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>57.13</b>	<b>%</b>			<b>57.13%</b>					
5	03	02	2	03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek Umum	1185	ASN		200	411	205.50	200	ASN	53	ASN			4.47%					
							Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya							313	Orang	187	Orang								
5	03	02	2	03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan Pengembangan Assesment Center dan Dokumen Monitoring pengembangan Kompetensi ASN	590	ASN		200	315	157.50	100	ASN	188	ASN			31.86%					
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Centre							4	Dok	-	Dok								



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kinerja s/ d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan																	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun n-1) - Sampai dengan TW I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)																
1						2		3		4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)				
5	03	02	2	03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Jabatan Fungsional tertentu yang ditempatkan sesuai dengan hasil Penilaian Tim Penilai	475	ASN				110	431	391.82	110	ASN	33	ASN	6.95%								
							Jumlah ASN Fungsional yang dibina									300	Orang	60	Orang									
5	03	02	2	03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Penerbitan SK Jabatan Fungsional Tertentu Yang Diangkat Dalam Tugas Tambahan	120	SK				30	139	463.33	30	SK	-	SK	0.00%								
							Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir									70	Orang	-	Orang									
5	03	02	2	03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah OPD Yang Dilakukan monitoring Jabatan Fungsional Tertentu	48	OPD				12	12	100.00	12	OPD	-	OPD	0.00%								
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional									4	Dok	1	Dok									
5	03	02	2	04		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase ASN yang berintegritas</b>	<b>100</b>	<b>%</b>				<b>100</b>	<b>112.56</b>	<b>112.56</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>30.71</b>	<b>%</b>	<b>30.71%</b>								
5	03	02	2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Fisik dan Psikologis PNS Oleh Tim Kesehatan Provinsi	12	ASN				3	5	166.67	3	ASN	-	ASN	0.00%								
							Jumlah ASN Yang mengikuti pemeriksaan Tes Urine	1200	ASN				300	273	91.00	300	ASN	38	ASN	3.17%								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Realisasi Target Kinera Hasil Program dan Keluaran Kinerja s/ d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan							
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun n-1) - Sampai dengan TW I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)					
		Jumlah ASN Yang mengikuti sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian	600	ASN		150	51	34.00	150	ASN	51	ASN	8.50%					
		Jumlah Dokumen hasil sosialisai Penguatan integritas terhadap ASN	12	Dok		3	2	66.67	3	Dok	-	Dok	0.00%					
		Jumlah ASN Yang Mengikuti Pengambilan Sumpah PNS	1000	ASN		250	387	154.80	250	ASN	-	ASN	0.00%					
		Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan							110	Orang	-	Orang						
5	03	02	2	04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diproses	12	Kasus		3	4	133.33	3	Kasus	2	Kasus	16.67%
							Jumlah Rapat Baperdispeg yang dilaksanakan	12	Kali		4	1	25.00	4	Kali	1	Kali	8.33%
							Jumlah Dokumen pelaksanaan monev perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	100	Dok		0	0	#DIV/0!	0	Dok	-	Dok	0.00%
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin							4	Laporan	3	Laporan	
5	03	02	2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan Pelayanan Penyelesaian KARIS/KARSU, Peningkatan Mental Spiritual, dan Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check-Up)	1340	ASN		2010	1838	91.44	2010	ASN	773	ASN	57.69%
							Jumlah ASN yang mendapat Penghargaan Pegawai teladan/ Terbaik	9	ASN		9	9	100.00	9	ASN	-	ASN	0.00%



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kinerja s/ d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan							
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun n-1) - Sampai dengan TW I		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
											10=(5+7+9)	11=(10/4)						
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)						
		Jumlah ASN yang diberikan penghargaan							273	Orang	252	Orang						
5	03	02	2	04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapat Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya	400	ASN		100	156	156.00	100	ASN	-	ASN	0.00%
		Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa							100	Orang	-	Orang						
5	03	02	2	04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah OPD yang melaksanakan Monitoring Aplikasi SIM TPP	124	OPD		31	31	100.00	31	OPD	-	OPD	0.00%
5	03	02	2	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah OPD yang menginput pelaporan kinerja Pemerintah Kota Pontianak dalam e-lapkin	120	OPD		30	31	103.33	30	OPD	22	OPD	18.33%
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring SKP	12	Dok					3	3	100.00	3	Dok	2	Dok	16.67%		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur							4	Dok	0	Dok						
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional	85	%		80	77.59	96.99	80	%	5.58	%	6.56%
5	04	02	2	02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100	%		100	96.98	96.98	100	%	6.98	%	6.98%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kinerja s/ d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan														
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun n-1) - Sampai dengan TW I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)													
1						2		3		4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
5	04	02	2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN Yang Mengikuti PKP	120	ASN		30	30	0.00	30	ASN	30	ASN	25.00%							
							Jumlah CASN yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS serta Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	1200	ASN		400	387	96.75	400	ASN	-	ASN	0.00%							
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, kepemimpinan dan Prajabatan							2	Laporan	-	Laporan								
5	04	02	2	02	08	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Krjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Penyeleksian Pendidikan dan Penjenjangan Diklat Struktural yang tersusun	0	Dok		0	0	0.00	1	Dok	-	Dok								
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Alumni Pasca Diklat	20	Dok		1	0	0.00	1	Dok	-	Dok	0.00%							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kinerja s/ d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan								
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun n-1) - Sampai dengan TW I		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
											10=(5+7+9)	11=(10/4)							
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)									
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama							1	Dok	-	Dok							
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	03	KEPEGAWAIAN																	
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100	%			100	95.94	95.94	100	%	95	%	95.00%			
5	03	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%				100	%	50	%	50.00%			
5	03	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	16	Dok			4	4	100.00	4	Dok	3	Dok	18.75%
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah						4	Dok	1	Dok				
5	03	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang	4	Sub Kegiatan			1	1	100.00	1	Sub Kegiatan	-	Sub Kegiatan	0.00%
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi						1	Dok	-	Dok				
5	03	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen	4	Sub Kegiatan			1	1	100.00	1	Sub Kegiatan	-	Sub Kegiatan	0.00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kinerja s/ d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan							
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun n-1) - Sampai dengan TW I		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
											10=(5+7+9)	11=(10/4)						
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil						1	Dok	-	Dok		
5	03	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan pada dokumen DPA SKPD yang disusun	4	Kegiatan		0	0	0.00	0	Kegiatan	-	Kegiatan	0.00%
5	03	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	4	Kegiatan		0	0	0.00	0	Kegiatan	-	Kegiatan	0.00%
5	03	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	24	Laporan		4	4	100.00	5	Laporan	2	Laporan	8.33%
							Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							7	Laporan	2	Laporan	
5	03	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	14	Laporan		3	3	100.00	3	Laporan	2	Laporan	14.29%
5	03	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan yang disusun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>97.56</b>	<b>97.56</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>50.00%</b>
5	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	48	Bulan		12	12	100.00	12	Bulan	6	Bulan	12.50%
							Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN							53	Orang/Bulan	50	Orang/Bulan	
5	03	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	49	Bulan		12	12	100.00	12	Bulan	6	Bulan	12.24%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kinerja s/ d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan							
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun n-1) - Sampai dengan TW I		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
											10=(5+7+9)	11=(10/4)						
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)						
		Jumlah Dokumen Hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							12	Laporan	3	Laporan						
5	03	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan		1	1	100.00	1	Laporan	1	Laporan	25.00%
		Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							1	Laporan	1	laporan						
5	03	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	16	Bahan		4	3	75.00	4	Bahan	2	Bahan	12.50%
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tindak Lanjut pemeriksaan							4	Dok	-	Dok						
5	03	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	72	Laporan		12	12	100.00	12	Laporan	5	Laporan	6.94%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD							12	Laporan	3	Laporan						
5	03	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan administrasi kantor</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>50.00%</b>
5	03	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	48	Bulan		12	12	100.00	12	Bulan	6	Bulan	12.50%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kinerja s/ d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan							
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun n-1) - Sampai dengan TW I		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
											10=(5+7+9)	11=(10/4)						
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan							12	Paket	3	Paket						
5	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	49	Bulan		12	12	100.00	12	Bulan	6	Bulan	12.24%
		Jumlah paket Barang dan Penggandaan yang disediakan									12	Paket	3	paket				
5	03	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	40	Jenis		10	10	100.00	10	Jenis	6	Jenis	15.00%
		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan									10	Paket	-	paket				
5	03	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11680	Exemplar		2920	2920	100.00	2920	exemplar	1,270	exemplar	10.87%
		Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan									24	Dokumen	3	Dokumen				
5	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	48	Bulan		12	12	100.00	12	Bulan	6	Bulan	12.50%
		Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									10	Laporan	1	laporan				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kinerja s/ d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan							
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun n-1) - Sampai dengan TW I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1					4		6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)				
5	03	01	2	07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan barang inventaris</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>87.14</b>	<b>87.14</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>46.96</b>	<b>%</b>	<b>46.96%</b>	
5	03	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	122	Unit		27	27	100.00	59	Unit	37	Unit	30.33%
5	03	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	75	Unit		42	33	78.57	56	Unit	17	Unit	22.67%
							Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan							34	Unit	28	Unit	
5	03	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Unit		1	1	100.00	0	Unit	-	Unit	0.00%
5	03	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan urusan adminitrasi kantor</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>%</b>	<b>0.00%</b>
5	03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	48	Bulan		12	12	100.00	12	Bulan	6	Bulan	12.50%
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							1	Laporan	-	laporan	
5	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	48	Bulan		12	12	100.00	12	Bulan	6	Bulan	12.50%
							Jumah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan							12	Laporan	3	Laporan	
5	03	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	48	Bulan		12	12	100.00	12	Bulan	6	Bulan	12.50%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kinerja s/ d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan							
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun n-1) - Sampai dengan TW I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)					
		Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralaan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan							12	Laporan	3	Laporan						
5	03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	48	Bulan		12	12	100.00	12	Bulan	3	Bulan	6.25%
							jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan							12	Laporan	3	laporan	
5	03	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang inventaris yang dipelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>93.48</b>	<b>93.48</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>56.62</b>	<b>%</b>	<b>56.62%</b>
5	03	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	Unit		1	1	100.00	1	Unit	-	Unit	0.00%
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi							1	Unit	-	Unit	
5	03	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	8	Unit		2	2	100.00	2	Unit	-	Unit	0.00%
							Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dab dibayarkan pajaknya							2	Unit	2	Unit	
5	03	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	172	Unit		43	40	93.02	43	Unit	26	Unit	15.12%
							Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara							57	Unit	10	Unit	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kinerja s/ d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan																																											
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun n-1) - Sampai dengan TW I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)																																										
1					2					3					4					5					6					7					8=(7/6)					9					10=(5+7+9)					11=(10/4)				
5	03	01	2	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	100	%		100	93.41	93.41	100	%	50	%	50.00%																																				
5	03	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	504	Stel		182	170	93.41	126	Stel	54	Stel	10.71%																																				
							Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya							2	Paket	-	Paket																																					



































## 2.2 Analisis Kinerja BKPSDM

Pembentukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak untuk mengemban sebahagian tugas dari Walikota Pontianak di bidang kepegawaian, mulai dari perencanaan akan kebutuhan pegawai sampai dengan pendistribusian dan penataan pegawai guna mewujudkan pegawai yang berkualitas, kompeten dan profesional sehingga menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas dari KKN.

RPD Kota Pontianak telah menetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama BKPSDM adalah Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan sasaran Terwujudnya Sistem Merit dalam manajemen ASN Kota Pontianak. Berdasarkan PermenpanRB Nomor 38 Tahun 2018 tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Berdasarkan hasil perhitungan mandiri yang dilakukan oleh BKPSDM Kota Pontianak. Indeks profesionalitas ASN Kota Pontianak tahun 2022 adalah sebesar 49.90 dengan kategori rendah.

Hasil tersebut menggambarkan bahwa tingkat profesionalitas ASN rata-rata masih rendah. Diperlukan langkah-langkah dan tindakan yang signifikan untuk meningkatkan profesionalitas ASN Pemerintah Kota Pontianak terutama pada dimensi kompetensi dengan memperbanyak penyelenggaraan kegiatan diklat, bimtek, *workshop* dan sejenisnya bagi ASN Pemerintah Kota Pontianak.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM

Kota Pontianak

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Relisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Indeks Profesionalitas ASN	-	Meningkatkan Profesionalitas ASN	70	75	49,9	63,44	71	73	
2.	Indeks Sistem Merit		Terwujudnya Sistem Merit dalam manajemen ASN Kota Pontianak	325	330	317	331	325	327	

### **2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu penting di bidang kepegawaian, adapun isu-isu tersebut antara lain :

- a) Kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur masih belum optimal, yang berdampak pada belum maksimalnya kualitas pelayanan.
- b) Jumlah Sumber Daya Aparatur yang masih belum ideal sehingga terjadi kekurangan pegawai ;
- c) Masih rendahnya nilai profesionalitas individu sebagian besar ASN ;
- d) Mutasi, Rotasi, dan Promosi belum sesuai dengan sistem pola karir;

Selain isu-isu penting di atas ada banyak hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah dapat disebutkan sebagai berikut :

#### **1. Kekuatan :**

- a. Struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak yang jelas.
- b. Adanya sumber pembiayaan yang jelas untuk program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.
- c. Motivasi yang tinggi dalam mewujudkan tujuan BKPSDM Kota Pontianak guna mencapai visi Kota Pontianak.

#### **2. Kelemahan :**

- a. Sistem informasi kepegawaian yang belum terintegrasi secara menyeluruh.

- b. Pengelolaan dan pengembangan data masih lemah.
- c. Belum optimalnya aktualisasi dari sumber daya aparatur yang ada.
- d. Terdapat perbedaan (Gap) antara kompetensi ASN dengan penempatan jabatan di Unit Kerja Perangkat Daerah.

**3. Peluang :**

- a. Adanya kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi.
- b. Tingginya komitmen Kepala Daerah untuk penegakan disiplin aparatur.
- c. Adanya berbagai kesempatan pengembangan kompetensi aparatur dari K/L dan lembaga lain.

**4. Tantangan :**

- a. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh ASN.
- b. Perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat harus disejajarkan dengan mekanisme kerja aparatur.
- c. Peran masyarakat terbuka secara luas untuk mengukur kinerja aparatur.

**5. Rekomendasi :**

- a. Mengikutsertakan ASN Pemerintah Kota Pontianak ke dalam pelatihan-pelatihan teknis dan fungsional baik yang dibiayai dari APBD maupun APBN.
- b. Mendorong ASN Pemerintah Kota Pontianak untuk meningkatkan kompetensi baik melalui jalur pendidikan formal maupun pelatihan klasikal dan non klasikal.
- c. Membangun sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi secara menyeluruh dengan sistem informasi dari lembaga terkait.
- d. Menerapkan sistem merit dalam manajemen kepegawaian serta memperjelas sistem *reward* dan *punishment* bagi ASN.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, target/tolak ukur dan besaran dan yang dibutuhkan. Pada anggaran tahun 2024 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak dapat disampaikan sebagai berikut :

TABEL 2.2  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024  
Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>4,938,808,049</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>4,938,808,049</b>	
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Pontianak	Persentase Administrasi Pelaksanaan Pengadaan, dan Pemberhentian ASN sesuai SOP serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi	100	%	689,341,795	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Pontianak	Persentase Administrasi Pelaksanaan Pengadaan, dan Pemberhentian ASN sesuai SOP serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi	100	%	689,341,795	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	Dok	17,500,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	Dok	17,500,000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dok	566,911,795	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dok	566,911,795	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	Dok	43,878,000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	Dok	43,878,000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dok	55,452,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dok	55,452,000	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	16	Dok	5,600,000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	16	Dok	5,600,000	
2	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase pelayanan kepegawaian yang sesuai SOP</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>595,156,000</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase pelayanan kepegawaian yang sesuai SOP</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>595,156,000</b>	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	Dok	97,020,000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	Dok	97,020,000	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Pontianak	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	Dok	100,726,000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Pontianak	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	Dok	100,726,000	
	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4	Dok	397,410,000	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4	Dok	397,410,000	
3	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>70</b>	<b>%</b>	<b>2,449,200,560</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>70</b>	<b>%</b>	<b>2,449,200,560</b>	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	2000	ASN	802,068,120	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	2000	ASN	802,068,120	
	Pengelolaan Assessment Center	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Centre	4	Dok	155,610,300	Pengelolaan Assessment Center	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Centre	4	Dok	155,610,300	
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2	Dok	75,528,340	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2	Dok	75,528,340	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80	Orang	451,000,000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80	Orang	451,000,000	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2	Dok	535,123,000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2	Dok	535,123,000	
	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	35	ASN	164,678,000	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	35	ASN	164,678,000	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kota Pontianak	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	250	Orang	242,797,300	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kota Pontianak	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	250	Orang	242,797,300	

TABEL 2.2  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024  
Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Pontianak	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200	Orang	4,250,000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Pontianak	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200	Orang	4,250,000	
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	4	laporan	15,000,000	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	4	laporan	15,000,000	
4	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase ASN yang berintegritas</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,205,109,694</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase ASN yang berintegritas</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,205,109,694</b>	
	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1200	Orang	244,903,944	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1200	Orang	244,903,944	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4	laporan	101,100,000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4	laporan	101,100,000	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1439	Orang	522,430,000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1439	Orang	522,430,000	
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50	Orang	17,550,000	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50	Orang	17,550,000	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	4	Dok	37,000,000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	4	Dok	37,000,000	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4	Dok	282,125,750	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4	Dok	282,125,750	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase ASN ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>1,246,629,772</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase ASN ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional</b>	<b>%</b>	<b>1,246,629,772</b>		
5	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Manajerial fungsional</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,246,629,772</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Manajerial fungsional</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,246,629,772</b>	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2	Laporan	1,185,554,972	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2	Laporan	1,185,554,972	
	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Krjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan, dan Prajabatan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	4	laporan	61,074,800	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Krjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan, dan Prajabatan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	4	laporan	61,074,800	

TABEL 2.2  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024  
Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase tingkat Kepuasan Bidang / bagian terhadap pelayanan kesekretariatan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>9,470,989,179</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase tingkat Kepuasan Bidang / bagian terhadap pelayanan kesekretariatan</b>		<b>9,470,989,179</b>	
<b>6</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>50,636,900</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah</b>		<b>50,636,900</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	15,966,900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	15,966,900
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	7,400,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	7,400,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	12,100,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	12,100,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	4	Laporan	10,900,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	4	Laporan	10,900,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	4,270,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	4,270,000
<b>7</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan yang disusun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>7,282,857,000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan yang disusun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>7,282,857,000</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang / Bulan	7,256,427,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang / Bulan	7,256,427,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Laporan	2,230,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Laporan	2,230,000
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	Dok	11,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	Dok	11,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	13,200,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	13,200,000
<b>8</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase Pelayanan administrasi kantor</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>572,276,250</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase Pelayanan administrasi kantor</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>572,276,250</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	277,136,150	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	277,136,150
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	128,051,400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	128,051,400
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	10,000,700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	10,000,700
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dok	12,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dok	12,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	145,088,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	145,088,000
<b>9</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase pemenuhan barang inventaris</b>	<b>85</b>	<b>%</b>	<b>200,000,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase pemenuhan barang inventaris</b>	<b>85</b>	<b>%</b>	<b>200,000,000</b>



TABEL 2.2  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024  
Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	Unit	100,000,000	Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	Unit	100,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34	Unit	100,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34	Unit	100,000,000	
<b>10</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase pelayanan urusan administrasi kantor</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>901,789,029</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase pelayanan urusan administrasi kantor</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>901,789,029</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	28,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	28,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	588,717,800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	588,717,800	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	40,200,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	40,200,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	244,871,229		Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	244,871,229	
<b>11</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase barang inventaris yang dipelihara</b>	<b>85</b>	<b>%</b>	<b>355,120,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase barang inventaris yang dipelihara</b>			<b>355,120,000</b>	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	57,800,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	57,800,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57	unit	197,320,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57	unit	197,320,000	
<b>12</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>108,310,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>108,310,000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3	Paket	108,310,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3	Paket	108,310,000	
	<b>Total</b>					<b>15,656,427,000</b>					<b>15,656,427,000</b>		

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. BKPSDM Kota Pontianak merupakan perangkat daerah yang secara teknis melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepegawaian bagi ASN Pemerintah Kota Pontianak. Oleh sebab itu untuk tahun 2024 tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap BKPSDM Kota Pontianak.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perencanaan jangka menengah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkomitmen untuk membangun sistem manajemen ASN yang dituangkan dalam Visi BKN 2020-2024 yaitu : *“Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.* Penjelasan dari visi Badan Kepegawaian Negara yaitu Profesional artinya, (a) pengelola ASN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, (b) pengelola ASN memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara. Berintegritas itu ada dua dimensi arti, yaitu 1) berintegritas yang berarti dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya, pengelola ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2) pengelola ASN itu terpercaya yang berarti pengelola ASN dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

Salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai BKN adalah “Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN”, dengan Indikator Kinerja:

- a. Persentase instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK
- b. Persentase instansi pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2020-2024 yaitu **“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”**”.

Salah satu Sasaran Strategis dari Kemenpan RB adalah: Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera Yang dimaksud dengan terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera yaitu menciptakan ASN yang mampu menunjukkan mutu atau kualitasnya dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya, memegang nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dalam bekerja dan melayani publik. Untuk mendukung keprofesionalitasan dan integritas ASN maka perlu diberikan tingkat kesejahteraan yang cukup yang tidak hanya berupa kompensasi material namun juga non material.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini akan dilihat dari:

- a. Indeks Sistem Merit
- b. Indeks Profesionalitas ASN

Terkait dengan sasaran Renstra Kemenpan RB, Renstra BKPSDM memiliki tujuan dan indikator tujuan yang selaras dengan sasaran Renstra BKN yaitu “Meningkatkan Profesionalitas ASN” dengan indikator tujuan “Indeks Profesionalitas ASN”. Hal ini menunjukkan bahwa renstra BKPSDM tahun 2024-2026 telah sejalan dengan renstra Kemenpan RB tahun 2020-2024.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kota Pontianak Tahun 2024 selaras dengan RPD Kota Pontianak yaitu Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan indikator sasaran yaitu Indeks Profesionalitas ASN.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur. Ukuran keberhasilan dari sasaran diwujudkan dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai. Adapun yang menjadi sasaran dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak yaitu Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen ASN Kota Pontianak dengan indikator Indeks Sistem Merit.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumberdaya organisasi ke dalam strategi organisasi. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Tabel. 3.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kota Pontianak  
Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
			1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan Profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN /	Baik (70%)	Baik (73%)	Baik (75%)
	Terwujudnya sistem merit dalam Manajemen ASN Kota Pontianak	Indeks Sistem Merit	Sangat Baik (325)	Sangat Baik (327)	Sangat Baik (329)

### **3.3. Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan**

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak yang direncanakan untuk Periode Tahun 2023 meliputi :

#### **1. Program Kepegawaian Daerah**

##### **a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**

Sub kegiatan :

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Pengelolaan Data Kepegawaian

##### **b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**

Sub kegiatan:

- Pengelolaan Mutasi ASN
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Pengelolaan Promosi ASN

##### **c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.**

Sub kegiatan:

- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
- Pengelolaan Assessment Center
- Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
- Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
- Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional

##### **d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.**

Sub kegiatan:

- Pembinaan Disiplin ASN

- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
  - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
  - Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
  - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- a. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.
- Sub kegiatan:
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
  - Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Krjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan, dan Prajabatan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Sub kegiatan:
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Sub kegiatan:
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah
  - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub kegiatan:

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Rencana Strategis BKPSDM Kota Pontianak Tahun 2024-2026, untuk rencana kerja tahun 2024 BKPSDM Kota Pontianak memiliki 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 50 (lima puluh) subkegiatan. Untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 15.656.427.000,- yang bersumber dari APBD Kota Pontianak dengan rincian seperti pada tabel 4.1 sebagai berikut:



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	100 %	55 orang / bulan	100 %	7,256,427,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	7,095,559,000
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	100 %	1 Laporan	100 %	2,230,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	2,230,000
5	03	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	100 %	4 Dokumen	100 %	11,000,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	11,000,000
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	100 %	12 Laporan	100 %	13,200,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	13,200,000
5	03	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>108,310,000</b>					<b>108,310,000</b>	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Pontianak	100 %	3 Paket	100 %	108,310,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	108,310,000
5	03	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>572,276,250</b>					<b>572,276,250</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak	100 %	10 Paket	100 %	10,000,700	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	100 %	10,000,700
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak	100 %	12 Paket	100 %	277,136,150	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	100 %	277,136,150
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak	100 %	12 Paket	100 %	128,051,400	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	100 %	128,051,400
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak	100 %	4 Dokumen	100 %	12,000,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	100 %	12,000,000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak	100 %	10 Laporan	100 %	145,088,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	100 %	145,088,000
5	03	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>200,000,000</b>					<b>200,000,000</b>	
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak	100 %	30 Unit	100 %	100,000,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	100 %	100,000,000
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak	100 %	34 Unit	100 %	100,000,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	100 %	100,000,000
5	03	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>901,789,029</b>					<b>901,789,029</b>	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak	100 %	4 Laporan	100 %	28,000,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	100 %	28,000,000
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik yang disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak	100 %	4 Laporan	100 %	588,717,800	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	100 %	588,717,800

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak	100 %	4 Laporan	100 %	40,200,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	100 %	40,200,000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak	100 %	12 Laporan	100 %	244,871,229	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	100 %	244,871,229
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>355,120,000</b>				<b>355,120,000</b>		
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak	100 %	2 Unit	85 %	57,800,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	85 %	57,800,000
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lain yang dipelihara	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak	100 %	57 Unit	85 %	197,320,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	85 %	197,320,000
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak	100 %	1 Unit	85 %	100,000,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	85 %	100,000,000
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>							<b>4,938,808,049</b>				<b>4,938,808,049</b>		
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>							<b>689,341,795</b>				<b>689,341,795</b>		
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Pengadaan, dan Pemberhentian ASN sesuai SOP serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi	Kota Pontianak	100 %	2 Dokumen	100 %	17,500,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	17,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah dokumen hasil kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Administrasi Pelaksanaan Pengadaan, dan Pemberhentian ASN sesuai SOP serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi	Kota Pontianak	100 %	2 Dokumen	100 %	566,911,795	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	566,911,795
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Administrasi Pelaksanaan Pengadaan, dan Pemberhentian ASN sesuai SOP serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi	Kota Pontianak	100 %	4 Dokumen	100 %	43,878,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	43,878,000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Pelaksanaan Pengadaan, dan Pemberhentian ASN sesuai SOP serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi	Kota Pontianak	100 %	12 Dokumen	100 %	55,452,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	55,452,000
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Administrasi Pelaksanaan Pengadaan, dan Pemberhentian ASN sesuai SOP serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi	Kota Pontianak	100 %	16 Dokumen	100 %	5,600,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	5,600,000
5	03	02	2.02		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>							<b>595,156,000</b>					<b>595,156,000</b>	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Mutasi jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrasi, jabatan pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian yang sesuai SOP	Kota Pontianak	80 %	4 Dokumen	80 %	97,020,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	85 %	97,020,000
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase pelayanan kepegawaian yang sesuai SOP	Kota Pontianak	80 %	2 Dokumen	100 %	100,726,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	85 %	100,726,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Persentase pelayanan kepegawaian yang sesuai SOP	Kota Pontianak	80 %	4 Dokumen	100 %	397,410,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	85 %	397,410,000
5 03 02 2.03	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>								<b>2,449,200,560</b>					<b>2,449,200,560</b>
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Kota Pontianak	70 %	2000 Orang	100 %	802,068,120	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	802,068,120
5 03 02 2.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Kota Pontianak	70 %	4 Dokumen	100 %	155,610,300	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	155,610,300
5 03 02 2.03 03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Kota Pontianak	70 %	2 Dokumen	100 %	75,528,340	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	75,528,340
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Kota Pontianak	70 %	80 Orang	100 %	451,000,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	451,000,000
5 03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan kerjasama Pelaksanaan Diklat	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Kota Pontianak	70 %	2 Dokumen	100 %	535,123,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	535,123,000
5 03 02 2.03 10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitas sertifikasi jabatan fungsional ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Kota Pontianak	70 %	200 Orang	100 %	164,678,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	164,678,000
5 03 02 2.03 11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Kota Pontianak	70 %	4 Laporan	100 %	3,145,500	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	3,145,500
5 03 02 2.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Kota Pontianak	70 %	250 Orang	100 %	242,797,300	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	242,797,300
5 03 02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Kota Pontianak	70 %	200 Orang	100 %	4,250,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	4,250,000
5 03 02 2.03 15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Kota Pontianak	70 %	4 Laporan	100 %	15,000,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	15,000,000
5 03 02 2.04	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>								<b>1,205,109,694</b>					<b>1,205,109,694</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang memiliki disiplin dan integritas tinggi	Kota Pontianak	100 %	4 Dokumen	100 %	282,125,750	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	85 %	282,125,750		
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Persentase ASN yang memiliki disiplin dan integritas tinggi	Kota Pontianak	100 %	1439 Orang	100 %	522,430,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	85 %	522,430,000		
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	Persentase ASN yang memiliki disiplin dan integritas tinggi	Kota Pontianak	100 %	50 Orang	100 %	17,550,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	85 %	17,550,000		
5	3	2	2.04	6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan tanda Jasa Aparatur	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian (enghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Persentase ASN yang memiliki disiplin dan integritas tinggi	Kota Pontianak	100 %	4 Dokumen	100 %	37,000,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah		37,000,000		
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan kedisiplinan	Persentase ASN yang memiliki disiplin dan integritas tinggi	Kota Pontianak	100 %	1200 Orang	100 %	244,903,944	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	85 %	244,903,944		
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah laporan Hasil pengelolaan Penyelesaian Penyelenggaraan Disiplin ASN	Persentase ASN yang memiliki disiplin dan integritas tinggi	Kota Pontianak	100 %	4 Laporan	100 %	101,100,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	85 %	101,100,000		
5	04				<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>														<b>1,246,629,772</b>	
5	04	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>															<b>1,246,629,772</b>
5	04	02	2.02		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>															<b>1,246,629,772</b>
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah , Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Pontianak	80 %	2 Laporan	100 %	1,185,554,972	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase ASN yang ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional	85 %	1,185,554,972		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Krjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan, dan Prajabatan	Persentase ASN ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Pontianak	80 %	4 Dokumen	100 %	61,074,800	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional	85 %	61,074,800
<b>TOTAL</b>												<b>15,656,427,000</b>		<b>15,495,559,000</b>			



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu RENJA juga berfungsi untuk mengevaluasi kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis BKPSDM Kota Pontianak tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Pontianak tahun 2024-2026.. Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam RENJA diharapkan akan lebih terkoordinasi, efektif, dan efisien dengan menitikberatkan pada pencapaian kinerja.

Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan BKPSDM Kota Pontianak sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam RENJA tahun 2024 ini. Keberhasilan pelaksanaan RENJA BKPSDM Kota Pontianak tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh ASN BKPSDM Kota Pontianak serta *stakeholder* yang bersangkutan untuk mewujudkan peningkatan profesionalisme ASN Pemerintah Kota Pontianak.

Pontianak, Agustus 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kota Pontianak



Yuni Resdiah, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690606 198903 2 007